

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**
PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 merupakan dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan kerja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Timur. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Tahun 2025–2029 yang selaras dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029. Selain itu, Rencana Strategis ini juga disusun dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Akhir kata, kami berharap dokumen Renstra yang telah disusun ini agar dapat dilaksanakan dengan baik dan meraih capaian yang memuaskan pada akhir periode dalam rangka mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman sehingga mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia, yakni "Bersama Indonesia Manju, Menuju Indonesia Emas 2045.

Surabaya, 16 Januari 2026

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur



Shinta Dewi Astari S.T., M.T.

NIP. 198212072006042021

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. KONDISI UMUM.....	4
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	14
1.2.1. POTENSI	14
1.2.2. PERMASALAHAN.....	14
BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	16
2.1. TUJUAN	16
2.2. SASARAN PROGRAM.....	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	20
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT ORGANISASI	20
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATUAN KERJA.....	24
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
4.1. TARGET KINERJA	27
4.2. KERANGKA PENDANAAN.....	29
BAB V PENUTUP.....	30
LAMPIRAN	31

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

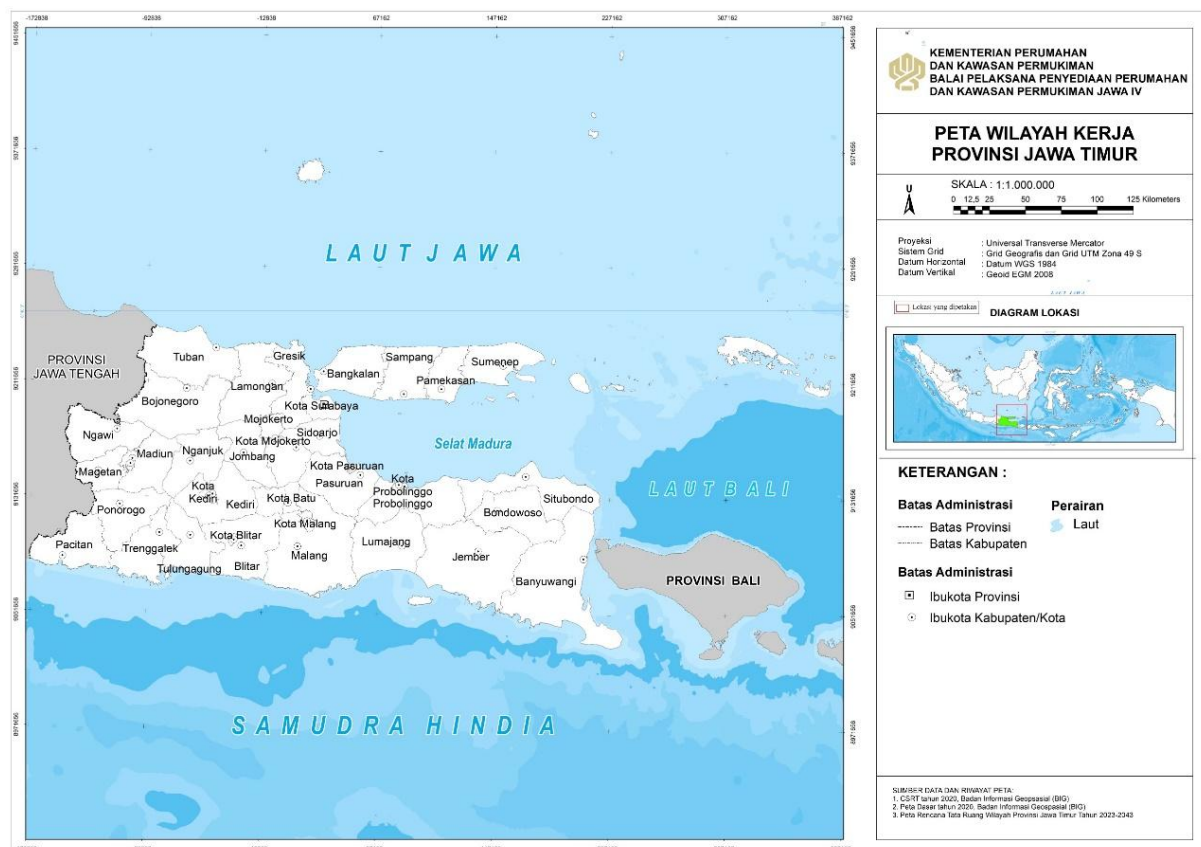
Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Bahkan telah diatur lebih jauh lagi tidak hanya hak tetapi juga kewajiban, bahwa setiap orang wajib menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah memiliki peran yang penting untuk memastikan amanat tersebut dapat terwujud sehingga akses masyarakat terhadap perumahan dapat terjamin.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 35/KPTS/M/2025 yang disahkan pada bulan Maret 2025 dan merupakan unit kerja yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur membantu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV sebagai unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah sebesar 48.036,84 Km² terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 773 Kelurahan dan 7.721 Desa. Letak astronomis Provinsi Jawa Timur pada 110° 50' 28.520" hingga 116° 28' 17.156" Bujur Timur dan 4° 50' 30.680" hingga 8° 58' 52.699" Lintang Selatan dan wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 287 pulau.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Pulau Jawa. Dinamika laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur mengalami tren kenaikan berdasarkan hasil proyeksi penduduk Jawa Timur 2020-2050, tahun 2025 jumlah penduduk Jawa Timur sekitar 42,09 juta jiwa, angka kepadatan penduduk mencapai 876 jiwa/km², sedangkan rasio jenis kelamin sebesar 99,37¹.

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025*, Hal.70.



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Satker PKP Provinsi Jawa Timur

Tabel 1. Jumlah Penduduk Jawa Timur 2025 Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050

Indikator	Tahun					
	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Jumlah Penduduk (jiwa)	42.089.271	43.279.076	44.145.661	44.669.897	44.860.792	42.089.271

Pertumbuhan ini membawa tantangan besar pada aspek kesejahteraan, mengingat saat ini terdapat sekitar 18.466.847 jiwa penduduk yang berada dalam status kesejahteraan 40% terbawah, dengan konsentrasi populasi rentan terbanyak berada di Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang. Sebaran penduduk saat ini masih terkonsentrasi di kawasan metropolitan dan zona industri, terutama di aglomerasi Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) serta Malang Raya. Sebaliknya, wilayah bagian selatan, tapal kuda, dan kepulauan memiliki kepadatan yang lebih rendah namun menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses layanan dasar serta risiko bencana yang tinggi. Karakteristik wilayah berdasarkan kepadatan seperti kawasan metropolitan, kawasan industri, wilayah agraris perdesaan, kawasan pesisir, serta wilayah rawan bencana tersebut memengaruhi tipologi kebutuhan perumahan dan pendekatan intervensi pembangunan kawasan permukiman serta kebutuhan hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Berdasarkan Data BPS Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025 menunjukkan di Provinsi Jawa Timur distribusi rumah tangga menurut luas lantai menunjukkan bahwa struktur hunian di Jawa Timur didominasi oleh rumah dengan luas 50–99 m² (54,49%), yang mengindikasikan mayoritas rumah tangga telah menempati hunian dengan ukuran relatif memadai sesuai standar rumah sederhana sehat. Kelompok 20–49 m² (14,60%) masih cukup besar, yang umumnya menggambarkan hunian sederhana

di kawasan padat perkotaan maupun perdesaan berkembang. Proporsi rumah sangat kecil ($\leq 19 \text{ m}^2$) relatif rendah (1,46%), namun tetap menjadi indikator kerentanan hunian ekstrem. Sementara itu, rumah dengan luas $\geq 100 \text{ m}^2$ mencapai 29,45%, mencerminkan keberagaman struktur sosial ekonomi. Secara umum, komposisi ini menunjukkan kondisi hunian yang cenderung stabil dengan dominasi kelas menengah bawah².

Sedangkan tahun 2024 distribusi rumah tangga menurut sumber air minum mencapai angka diatas 90% rumah tangga telah mengakses sumber air minum layak, dengan dominasi air kemasan/isi ulang (37,73%), sumur bor/pompa (24,37%), sumur terlindungi (14,33%) dan ledeng (9,31%). Tingginya penggunaan air isi ulang diindikasikan sebagai respons terhadap keterbatasan kualitas air tanah atau jaringan perpipaan di wilayah perkotaan. Akses ledeng/PDAM (9,31%) menunjukkan bahwa cakupan layanan perpipaan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target SDGs. Keberadaan 2,05% rumah tangga yang masih menggunakan sumber tidak terlindungi menjadi perhatian karena berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat³.

Secara umum distribusi rumah tangga terhadap akses sumber penerangan utama di Provinsi Jawa Timur tahun 2024 hampir mencapai 100% di seluruh Kabupaten/Kota. Akses penerangan utama 99,71% terfasilitasi listrik PLN dan 0,29% listrik non-PLN. Mayoritas daerah telah mencapai cakupan listrik PLN sepenuhnya 100%, sedangkan terdapat disparitas wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep mencatatkan persentase akses listrik PLN terendah di Jawa Timur sebesar 92,57%, dan 7,43% rumah tangga menggunakan listrik non-PLN sebagai alternatif utama⁴.

Keterbatasan lahan serta tingginya harga tanah membatasi penyediaan rumah tapak terjangkau dan meningkatkan kebutuhan hunian vertikal. Struktur penggunaan lahan di Provinsi Jawa Timur saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, baik lahan basah maupun kering, yang mencakup sekitar 43,16% dari total luas wilayah. Selain sektor pertanian, sektor kehutanan memegang peranan penting dengan luas mencapai 28,35% yang sebarannya terkonsentrasi secara merata di bagian selatan Jawa Timur. Sementara itu, seiring dengan pesatnya perkembangan jaringan jalan dan urbanisasi, lahan terbangun kini telah mencakup 12,87% wilayah, dengan konsentrasi pembangunan terbesar berada di Kota Surabaya beserta daerah-daerah penyangganya. Berdasarkan kerangka regulasi RTRW 2023-2043, proporsi pemanfaatan ruang di Jawa Timur telah ditetapkan secara strategis, yakni sebesar 16,54% dialokasikan sebagai kawasan lindung guna menjaga keseimbangan ekosistem, sedangkan 83,46% sisanya diproyeksikan sebagai kawasan budidaya untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah⁵.

Provinsi Jawa Timur didominasi wilayah perdesaan dengan total 7.721 desa yang tersebar di 29 kabupaten dan 9 kota. Beberapa kabupaten dengan jumlah desa terbanyak antara lain:

1. Kabupaten Lamongan: 462 desa
2. Kabupaten Bojonegoro: 419 desa
3. Kabupaten Malang: 378 desa

² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025*, Hal.226.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025*, Hal.227.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025*, Hal.230.

⁵ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045*.

4. Kabupaten Pasuruan: 341 desa
5. Kabupaten Kediri: 343 desa

Secara keseluruhan, wilayah perdesaan ini mencakup sebagian besar luas daratan Jawa Timur yang mencapai 48.036,84 Km², perumahan didominasi rumah swadaya dengan kualitas beragam sehingga memerlukan peningkatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, kawasan pesisir dan rawan bencana membutuhkan standar rumah tahan bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi risiko. Kondisi ini menuntut pendekatan penyelenggaraan perumahan yang adaptif sesuai tipologi wilayah dan tingkat risiko. Menurut data BPBD Jawa Timur Tahun 2025, jumlah desa/kelurahan rawan bencana mencapai sekitar 5.254 desa/kelurahan, meningkat dibanding periode sebelumnya. Sepanjang Januari–Oktober 2025 tercatat lebih dari 260 kejadian bencana, didominasi oleh banjir, angin kencang, tanah longsor, dan kebakaran hutan/lahan⁶.

Wilayah dengan risiko tinggi antara lain kawasan tapal kuda, perbukitan selatan, dan daerah sekitar gunung api aktif seperti Gunung Semeru. Kondisi ini menuntut integrasi mitigasi risiko dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Kondisi geologis dan iklim Jawa Timur menempatkan provinsi ini pada tingkat indeks risiko bencana yang tinggi dengan berbagai ancaman yang kompleks. Ancaman banjir menjadi perhatian serius di 12 wilayah, terutama di Ponorogo, Malang, Sidoarjo, serta seluruh wilayah Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Di sektor geologi, wilayah selatan seperti Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan Malang memiliki risiko gempa bumi kategori tinggi, yang dibarengi dengan ancaman tsunami di sepanjang pesisir selatan Jawa Timur. Selain itu, potensi kebakaran hutan dan lahan membayangi 31 kabupaten/kota, dengan tingkat risiko tertinggi berada di 14 wilayah termasuk Banyuwangi, Jember, dan Situbondo. Kerentanan ini semakin lengkap dengan keberadaan 10 gunung api aktif yang terus dipantau risikonya, di antaranya adalah Gunung Semeru, Kelud, Bromo, dan Ijen yang secara historis memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya⁷.

Berdasarkan dashboard perumahan Kementerian PKP Tahun 2025 menunjukkan bahwa data backlog perumahan di Provinsi Jawa Timur masih cukup signifikan mencapai 14.733.859 rumah tangga, yang terdiri atas backlog kepemilikan sebesar 1.866.607 unit dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 2.546.007 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga rumah tangga di Jawa Timur masih menghadapi permasalahan akses kepemilikan rumah atau kualitas hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.

Tabel 2. Data Backlog Perumahan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 2025

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
1	KAB. JEMBER	124.758	195.098	319.856
2	KOTA SURABAYA	189.375	96.206	285.581
3	KAB. MALANG	99.053	165.331	264.384

⁶ BPBD Provinsi Jawa Timur, *Data Desa/Kelurahan Rawan Bencana dan Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2025*.

⁷ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045*.

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
4	KAB. PROBOLINGGO	51.846	145.900	197.746
5	KAB. SUMENEP	19.612	163.109	182.721
6	KAB. BOJONEGORO	49.871	117.058	166.929
7	KAB. BANYUWANGI	85.498	71.114	156.612
8	KAB. PASURUAN	47.720	107.309	155.029
9	KAB. SIDOARJO	93.478	56.620	150.098
10	KAB. BANGKALAN	29.842	119.417	149.259
11	KAB. BONDOWOSO	28.224	120.901	149.125
12	KAB. KEDIRI	92.821	55.298	148.119
13	KAB. PAMEKASAN	21.967	113.796	135.763
14	KAB. BLITAR	64.746	67.122	131.868
15	KAB. LUMAJANG	39.649	90.825	130.474
16	KAB. JOMBANG	83.177	45.848	129.025
17	KAB. NGANJUK	68.161	59.250	127.411
18	KAB. NGAWI	46.614	80.681	127.295
19	KAB. TUBAN	45.412	75.754	121.166
20	KAB. SITUBONDO	30.607	87.654	118.261
21	KAB. TULUNGAGUNG	64.903	52.531	117.434
22	KAB. GRESIK	63.340	42.218	105.558
23	KAB. LAMONGAN	49.190	46.147	95.337
24	KAB. MOJOKERTO	60.028	32.519	92.547
25	KAB. SAMPANG	23.418	68.160	91.578
26	KAB. PONOROGO	45.008	43.003	88.011
27	KAB. TRENGGALEK	29.878	57.294	87.172
28	KAB. PACITAN	15.865	60.503	76.368
29	KOTA MALANG	45.888	26.477	72.365
30	KAB. MADIUN	37.744	34.204	71.948
31	KAB. MAGETAN	34.274	14.881	49.155

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
32	KOTA KEDIRI	21.816	4.274	26.090
33	KOTA PROBOLINGGO	11.246	8.649	19.895
34	KOTA PASURUAN	10.374	6.869	17.243
35	KOTA MADIUN	13.510	1.806	15.316
36	KOTA BATU	7.504	6.391	13.895
37	KOTA BLITAR	10.429	3.295	13.724
38	KOTA MOJOKERTO	9.761	2.495	12.256
Total		1.866.607	2.546.007	4.412.614

Sumber: Sistem Informasi Kawasan Kumuh (SIKAWANKU) Provinsi Jawa Timur

Permasalahan tersebut umumnya terkonsentrasi di kawasan padat perkotaan, bantaran sungai, wilayah pesisir, serta kantong-kantong kemiskinan perkotaan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan risiko kesehatan dan kerentanan terhadap bencana.

Data BPS Jatim 2024 menyebutkan bahwa distribusi rumah tangga menurut fasilitas sanitasi sebanyak 95,99% rumah tangga telah mendapatkan fasilitas sanitasi dasar cukup baik. Rumah tangga memiliki jamban sendiri sejumlah 88,12%, 7,87% rumah tangga mendapatkan akses sanitasi secara komunal maupun MCK umum. Namun, masih terdapat 4,01% rumah tangga tanpa fasilitas sanitasi, yang berpotensi melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS)⁹. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun target akses sanitasi layak telah mendekati universal, masih diperlukan intervensi pada kelompok rentan, khususnya di kawasan perdesaan tertinggal dan permukiman kumuh.

Aspirasi masyarakat Jawa Timur terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal berfokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini mencakup kebutuhan mendesak akan kemudahan akses pembiayaan, jaminan kepastian legalitas aset, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai dan tangguh terhadap risiko bencana

Selain aspek bangunan fisik, masyarakat juga mengharapkan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) yang memadai serta terintegrasi untuk mendukung kualitas lingkungan permukiman. Mengingat kondisi geologis wilayah yang rawan, aspirasi utama lainnya adalah terwujudnya hunian yang aman dari risiko bencana (resilien). Menanggapi hal tersebut, arah kebijakan jangka panjang Jawa Timur difokuskan pada penguatan ekosistem pembiayaan, fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya, pembangunan rumah susun di kawasan aglomerasi, serta percepatan penyusunan rencana detail tata ruang yang mengedepankan aspek keamanan dan keberlanjutan.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025*, Hal.231.

Penguatan tata kelola melalui optimalisasi Klinik PKP menjadi penting sebagai sarana konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan teknis terkait pembiayaan, regulasi, dan standar pembangunan. Dukungan regulasi dan SOP yang terstandar khususnya dalam verifikasi data, penyaluran bantuan, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan publik diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah serta pencapaian target pembangunan perumahan.

Dalam konteks kebijakan nasional, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Timur merupakan bagian dari implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah, yang bertujuan mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau melalui pembangunan rumah tapak bersubsidi, rumah susun, rumah khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dan penanganan kawasan kumuh. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi prioritas dalam pencapaian target nasional tersebut mengingat tingginya kebutuhan hunian dan luasnya kawasan kumuh yang perlu ditangani.

Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Periode 2025–2029 disusun sebagai evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan perumahan periode sebelumnya. Pada periode 2020-2024, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya Bernama Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Perumahan dan Suburusan Pemerintahan di Kawasan Permukiman dibawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Seluruh target dan capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur pada periode 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Tahun 2020-2024 berdasarkan Target Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Capaian Renstra 2020-2024	Prosentase Capaian Kinerja
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	7	6	85,71%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	67.120	102.943	153,37%
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	5.626	1.669	29,67%
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	61	9	14,75%
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	150	2.009	1.339,33%
6	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Capaian Renstra 2020-2024	Prosentase Capaian Kinerja
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas Bantuan PSU	Unit	22.142	8.855	39,99%
8	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Layanan	14	12	85,71%

1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, target yang tercantum untuk kegiatan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan adalah sebanyak 7 Laporan. Target pada Renstra tersebut mencakup Laporan untuk kegiatan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan, kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kegiatan Sinkronisasi Program Pusat Daerah. **Dalam kurun waktu 2020-2024, capaian kegiatan ini sebanyak 6 Laporan atau sebesar 85,71%** dikarenakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kegiatan Sinkronisasi Program Pusat Daerah dialihkan menjadi tanggungjawab Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV sejak tahun 2021.

2. Jumlah Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, target yang tercantum untuk kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) sebesar 67.120 unit. Target ini mencakup kegiatan BSPS Reguler, BSPS PKE, dan BSPS KSPN. **Capaian kinerja kegiatan ini pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 102.943 unit atau sebesar 153,37%.**

3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, target yang tercantum untuk kegiatan Pembangunan Rumah Susun adalah sebesar 5.626 unit. Target ini mencakup Pembangunan Rumah Susun di Provinsi Jawa Timur. **Capaian kinerja kegiatan ini pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 1.669 unit atau sebesar 29,67%** dari target yang ditentukan. Rendahnya capaian kinerja kegiatan Pembangunan Rumah Susun ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran dari Kementerian Keuangan sebagai akibat adanya Pandemi COVID-19 dan adanya Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) yang mengakibatkan capaian target juga berkurang.

4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, target yang tercantum untuk kegiatan Pemeliharaan Rumah Susun sebesar 61 tower. Target ini mencakup Pemeliharaan atau Revitalisasi Rumah Susun di Provinsi Jawa Timur. **Capaian kinerja kegiatan ini pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 9 tower atau sebesar 14,75%.**

5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, target yang tercantum untuk kegiatan Pembangunan Rumah Khusus adalah sebesar 150 unit. **Capaian kinerja kegiatan ini pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 2.009 unit atau sebesar 1.339,33%.** Tingginya capaian kinerja kegiatan Pembangunan Rumah Khusus disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden pada tahun 2022 untuk melakukan Pembangunan rumah bagi korban Erupsi Gunung Semeru di Kab. Lumajang.

6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara

Tidak terdapat target Pemeliharaan Rumah Khusus pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024

7. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas bantuan PSU

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, target yang tercantum untuk kegiatan Fasilitasi Layanan Bantuan PSU untuk Rumah MBR sebesar 22.142 unit dengan **capaian target kinerja pada akhir tahun 2024 sebesar 8.855 unit atau sebesar 39,99%.** Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran.

8. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, target yang tercantum untuk kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan sebesar 14 Layanan. Kegiatan ini mencakup Layanan Sarana dan Prasarana Intenal, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran. **Capaian kinerja kegiatan ini pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 12 Layanan atau sebesar 85,71%.** Hal ini dikarenakan Layanan Sarana dan Prasarana Internal dialihkan menjadi tanggungjawab Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV untuk tahun 2023-2024.

Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024 berdasarkan Target Renstra 2020-2024

No.	Kegiatan	CAPAIAN KINERJA														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase
1	Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3	3	100,00 %	1	1	100,00 %	1	1	100,00 %	1	1	100,00 %	1	0	0,00%
2	BSPS Reguler dan PKE	12850	10000	77,82 %	5800	16280	280,69 %	11430	32033	280,25 %	17090	21946	128,41 %	19710	22257	112,92 %
3	BSPS KSPN	-	-	-	240	427	177,92 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rumah Susun dibangun	-	-	-	895	716	80,00 %	1434	187	13,04 %	1783	313	17,55 %	1514	453	29,92%
5	Rumah Susun dipelihara	11	5	45,45 %	5	0	0,00%	16	0	0,00%	16	4	25,00 %	13	0	0,00%
6	Rumah Khusus dibangun	-	-	-	30	57	190,00 %	40	1951	4877,50 %	40	1	2,50%	40	0	0,00%
7	Rumah Khusus dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Fasilitasi Layanan PSU untuk MBR	-	-	-	4500	2601	57,80 %	4537	1273	28,06 %	5775	3412	59,08 %	7330	1569	21,41%
9	Layanan Dukungan Manajemen	3	3	100,00 %	2	2	100,00 %	3	3	100,00 %	3	2	66,67 %	3	2	66,67%

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Secara umum, permasalahan penyelenggaraan perumahan adalah keterjangkauan masyarakat terhadap hunian yang layak huni, baik dalam hal pembelian rumah baru yang layak huni, maupun pembangunan rumah secara swadaya, serta masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni. Adapun permasalahan ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain tingginya laju pertumbuhan penduduk serta tingginya urbanisasi di perkotaan, yang tidak diimbangi dengan penyediaan hunian layak dan terjangkau. Selain itu juga, beberapa faktor lain yaitu rendahnya kemampuan masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membeli rumah yang layak ataupun membangun secara swadaya. Rumah yang dibangun oleh pengembang untuk MBR masih terbatas jumlahnya dimana hal itu tidak sebanding dengan kebutuhan pada Masyarakat.

Masalah lain adalah banyaknya keluarga yang masih menempati hunian tidak layak. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait kelayakan teknis hunian serta kemampuan memelihara dan merawat bangunan rumah. Selain itu, pengembang perumahan juga belum didukung dengan regulasi yang bersifat insentif. Hal tersebut mengakibatkan hunian yang telah dibangun belum sesuai standar kelayakan atau berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru. Terlebih dalam pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan (urban area) yang terkendala dengan proses pengadaan lahan.

1.2.1. POTENSI

Potensi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan perumahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur antara lain:

- a. Tersedianya dukungan regulasi di Tingkat Nasional serta komitmen kuat dari Pemerintah dalam Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kawasan Kumuh yang menjadi dasar kuat untuk pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Terdapat potensi kolaborasi lintas sektor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dengan didorong oleh peran aktif Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan dan melakukan percepatan pelaksanaan program;
- c. Tersedianya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan Kawasan Permukiman; dan
- d. Tersedianya sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital (SIBARU) yang dapat meningkatkan efektifitas dalam pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas Kawasan kumuh.

1.2.2. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur antara lain:

- a. Masih tingginya backlog perumahan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terdapat total 4.412.614 KK backlog perumahan yang terdiri dari 1.866.607 KK yang masuk dalam backlog kepemilikan dan 2.546.007 KK yang masuk dalam backlog kelayakan (berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan

Permukiman, "Dashboard Capaian Sektor Perumahan," <https://my.pkp.go.id/dashboardpkp>, (diakses pada 20 Desember 2025);

- b. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan organisasi. Kondisi ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai yang masih terbatas, sehingga menghambat produktivitas dan kualitas kerja
- c. Ketersediaan lahan yang terbatas di Provinsi Jawa Timur mengingat provinsi ini merupakan provinsi yang padat penduduk. Selain itu hal ini menyebabkan harga tanah juga semakin meningkat, sehingga penyediaan lahan dengan luasan dan harga memadai untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah khususnya di perkotaan menjadi hal yang sulit. Hal ini menyebabkan munculnya masalah kelangkaan lahan yang berakibat pada harga tanah menjadi naik serta harga rumah menjadi lebih mahal dan tidak terjangkau oleh MBR;
- d. Kenaikan harga bangunan yang disebabkan banyaknya permintaan atau kebutuhan dan kelangkaan material yang terkadang terjadi di berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pembangunan perumahan khususnya;
- e. Kualitas rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat belum semuanya sesuai dengan standar kelayakan hunian. Oleh karenanya diperlukan pemberdayaan masyarakat yang dibantu oleh TFL (Tim Fasilitator Lapangan) di lapangan terkait penyelenggaraan perumahan, mulai dari perencanaan hingga pasca pembangunan. Namun kondisi di lapangan, pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal. Selain karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi secara aktif, kurangnya pengalaman TFL dalam bidang teknik pembangunan rumah dan/atau pemberdayaan masyarakat serta belum seimbangnya rasio antara TFL dan penerima bantuan;
- f. Berkas legalitas tanah (surat kepemilikan tanah) yang masih belum ada. Masih banyak rumah yang berdiri diatas tanah yang belum memiliki legalitas, sedangkan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan adalah harus memiliki legalitas kepemilikan tanah;
- g. Lahan eksisting rencana pembangunan yang belum siap seperti kondisi lahan masih memerlukan pematangan lahan terlebih dahulu, akses menuju lokasi tidak dapat dilewati alat berat dan penentuan lokasi dan titik pembangunan yang belum pasti;
- h. Masih lemahnya integrasi antara perencanaan permukiman dengan Upaya mitigasi bencana mengingat Provinsi Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana seperti gunung berapi, gempa, banjir, longsor, dll; dan
- i. Banyaknya intervensi dari pihak eksternal yang menghambat pelaksanaan Pembangunan seperti aduan Masyarakat ataupun pihak-pihak lain.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. TUJUAN

Dalam rangka mendukung Delapan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan amanat RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mendukung Asta Cita Nomor 6 yaitu **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan** yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 2025-2029. Dalam rangka mendukung misi tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan 2 (dua) tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nantinya akan diturunkan menjadi tujuan dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yaitu :

- a. peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif
- b. peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sejalan dengan 2 (dua) tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diatas, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan yang diturunkan dari tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pertama yaitu “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif di Provinsi Jawa Timur”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - e. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - f. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
2. Tujuan kedua yaitu “Peningkatan kualitas tata kelola Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur” dengan indikator kemajuan dalam kualitas layanan manajemen organisasi, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan tercapainya indikator ini, diharapkan kinerja

balai semakin kredibel dan pelaksanaan tugas serta fungsi dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh selama periode 2025-2029 agar efektif, efisien, dan akuntabel maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur berpedoman pada:

- a. RPJMN 2025-2029;
- b. Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 20252029;
- c. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 20252029;
- d. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 20252029;
- e. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 20252029; dan
- f. Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Tahun 20252029.

2.2. SASARAN PROGRAM SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur menjabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, melalui serangkaian program dan kegiatan. Mengacu pada sasaran strategis Unit Organisasi dan Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV, Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Hunian Layak, yaitu melalui kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni;
2. Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh, melalui kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh; dan
3. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur.

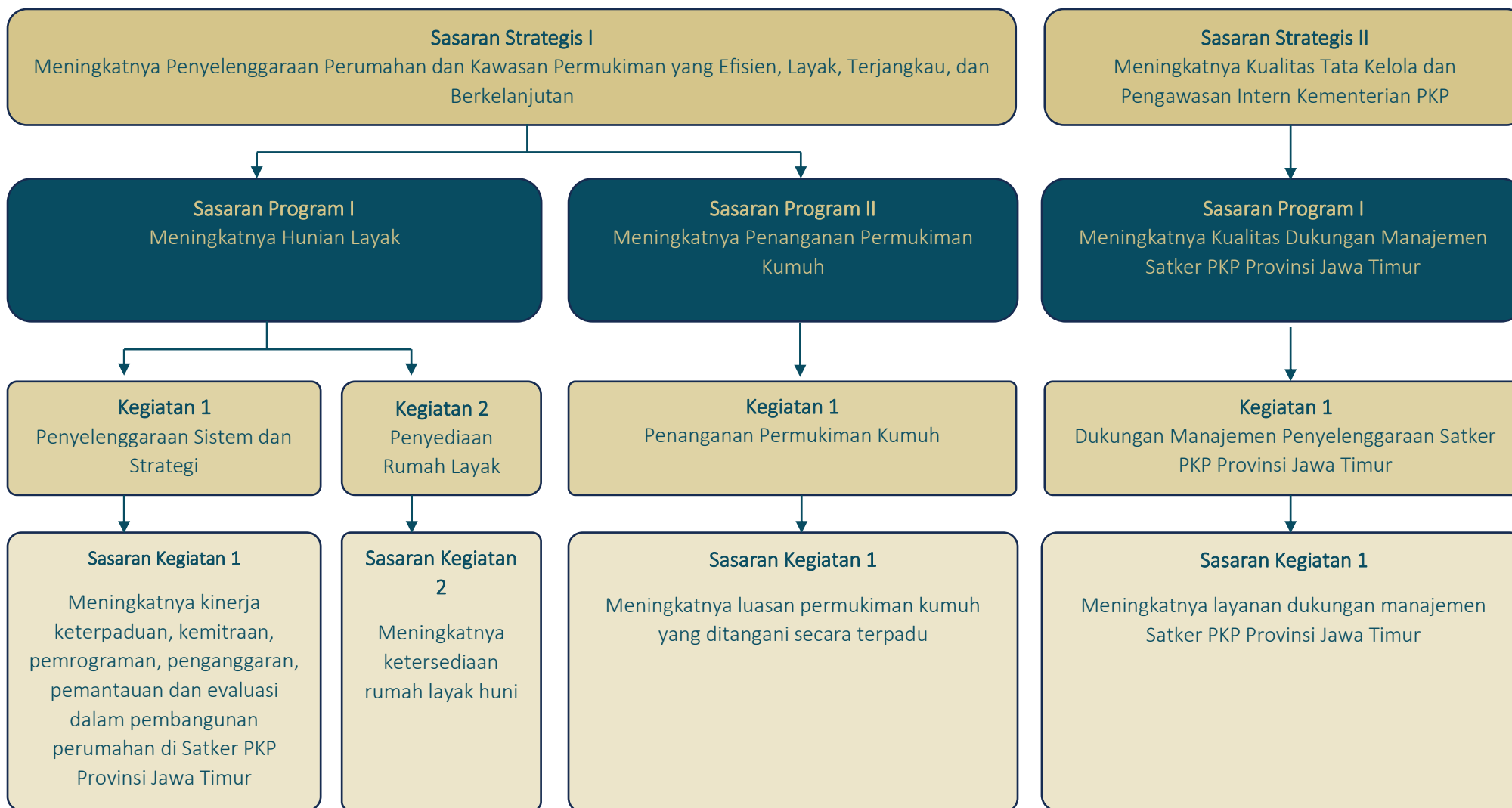
Sasaran Program (SP) tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang ditargetkan selama periode 2025-2029, sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 **Meningkatnya Hunian Layak, yaitu melalui kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni** dengan Sasaran Kegiatan:
 - Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Jawa IV
 - Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
2. Sasaran Program 2 **Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh, melalui kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh** dengan Sasaran Kegiatan:
 - Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
3. Sasaran Program 3 **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman** Provinsi Jawa Timur dengan Sasaran Kegiatan:
 - Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satker PKP Provinsi Jawa Timur

Tabel 5. Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Satker PKP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Meningkatnya Hunian Layak	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satker PKP Provinsi Jawa Timur	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni
	Penyediaan Rumah Layak Huni	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	• Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas • Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru • Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Penanganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satker PKP Provinsi Jawa Timur	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satker PKP Provinsi Jawa Timur	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satker PKP Provinsi Jawa Timur	Tingkat layanan dukungan manajemen Satker PKP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur digambarkan ke dalam bagan Pohon Kinerja sebagaimana berikut :



Gambar 2. Pohon Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

BAB III

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan [U26.1] dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan yang dapat dicapai dengan strategi:
 - Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya
 - Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi
 - Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau
 - Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertikal
- b. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif dengan strategi :
 - Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
 - Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang
- c. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu melalui strategi:
 - Pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu
 - Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman (rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran)
- d. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu melalui strategi:
 - Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
 - Peningkatan kolaborasi antar stakeholder dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan
 - Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
 - Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan

- Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan
- Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR

2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan melalui strategi:
 - Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan
 - Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan
 - Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perdesaan
 - Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum
 - Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria
- b. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif melalui strategi:
 - Inisiasi kerjasama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan
 - Pengembangan skema tabungan berencana
 - Pengembangan bantuan tunai/*in-kind* yang terintegrasi dengan program pembangunan desa
 - Pengembangan kerjasama dengan bumdes dalam penyediaan perumahan perdesaan
 - Pengembangan kerjasama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan
 - Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan
- c. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi melalui strategi:
 - Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan
 - Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan
 - Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan
 - Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan
 - Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan
 - Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan
 - Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal
- d. Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan melalui strategi:

- Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan
- Peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan
- Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Pelaksanaan koordinasi antar stakeholder terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan
- Penguatan kelembagaan

3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

- Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu (mixed-use, TOD).
- Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis Transit Oriented Development (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
- Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - Peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Pelaksanaan koordinasi antar stakeholder terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - Penguatan kelembagaan.
- Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antar level pemerintahan.

- f. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bank.
- g. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
- h. Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian PKP melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- b. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
- c. Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:
 - Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) dan kompetensi Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- d. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
 - Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis Satu Data Indonesia; dan
 - Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (evidence-based policy).
- e. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
 - Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- f. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
 - Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - Digitalisasi dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- g. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:

- Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- h. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
- Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi
- i. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
- Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis TI, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - Kolaborasi lintas K/L dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- j. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
- Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
 - Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATUAN KERJA

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi unit organisasi dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV selaku unit kerja, berikut arah kebijakan dan strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Meningkatkan akses Masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan secara terpadu di wilayah Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Jawa Timur dengan strategi:
- Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya
 - Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi
 - Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau
 - Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertikal
 - Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman (rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran)
- b. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
- Perbaikan kualitas layanan tata usaha pengelolaan kearsipan, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga membentuk 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman namun tetap memiliki kewajiban koordinasi dengan UKE-I yang lainnya. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Provinsi Jawa Timur menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV.

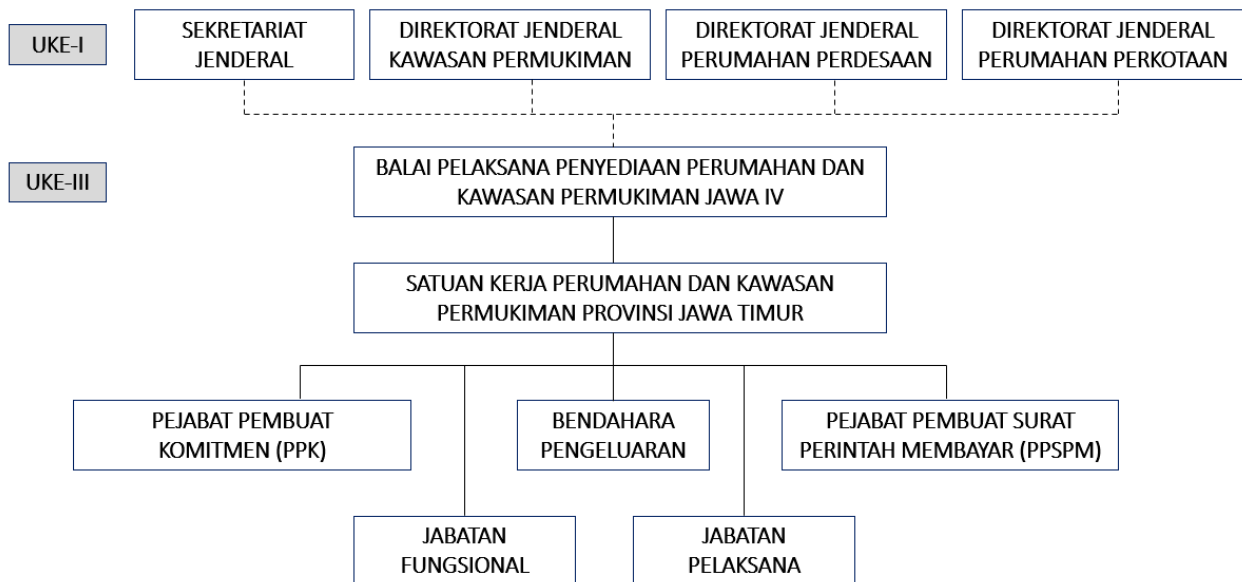
Dalam membantu tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV khususnya dalam hal pelaksanaan Pembangunan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman serta penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial di Provinsi Jawa Timur, maka dibentuklah **Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur**. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dan mengampu kegiatan dari 4 (empat) Unit Kerja Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat tenaga penunjang utama dalam susunan organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Kepala Satuan Kerja, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu juga terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seluruh jajaran dalam susunan organisasi pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan guna memastikan penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman di Provinsi Jawa Timur dapat berjalan secara efisien, efektif, dan optimal.

Beberapa tugas dan kewenangan masing-masing pejabat dalam susunan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. KPA/B mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik BMN dan mengurus sertifikasi tanah, serta bertanggung jawab kepada pelaksana program;
2. PPK mempunyai tugas dan kewenangan untuk menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK), bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK tersebut, serta bertanggung jawab kepada KPA/B;

3. PPSPM mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), dan bertanggungjawab kepada KPA/B;
4. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengelola uang persediaan Satuan Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja.



Gambar 3. Struktur Organisasi Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Timur

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur diartikan target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur disusun dengan memperhatikan target kinerja unit kerja di atasnya, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV, dan melalui kriteria-kriteria diantaranya:

- a. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran; dan
- b. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis, dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Rekapitulasi Target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dapat dilihat secara rinci pada table dibawah ini:

Tabel 6. Rekapitulasi Target Kinerja Satker PKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN	2025-2029
Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	12 laporan
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	6.711 unit
Penyediaan Rumah Layak Huni	
Pembangunan Rumah Swadaya	88.795 unit
Pembangunan Rumah Khusus	8.712 unit
Pembangunan Rumah Susun	2.156 unit
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	35 hektar

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN	2025-2029
Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	
Layanan Perkantoran	5 layanan
Layanan Umum	17 layanan
Layanan Sarana Internal	5 layanan
Layanan Reformasi Kinerja	4 layanan

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam melaksanakan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur selama periode 2025–2029, dukungan pendanaan utamanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV. Namun demikian, dalam pelaksanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Timur tidak menutup kemungkinan adanya dukungan sumber pendanaan lain yang berasal dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), swadaya masyarakat, maupun sumber-sumber lain yang sah.

Tabel 7. Rencana Kerangka Pendanaan Satker PKP Provinsi Jawa Timur 2025-2029

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN	2025-2029 (Rp. Ribu)
Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	1.571.388
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	101.740.930
Penyediaan Rumah Layak Huni	10.543.199.202
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	75.775.000
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	38.600.870
Jumlah	10.760.887.390

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025- 2029 disusun untuk mendukung Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Tahun 2025 - 2029. Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam dokumen perencanaan tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerinah Pusat, Pemerintah daerah serta dengan *stakeholder* lainnya agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata, terjangkau, dan berkelanjutan.

Pencapaian sasaran target Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan rakyat. Berbagai insentif diberikan oleh Pemerintah untuk mendorong swasta dan masyarakat membangun rumah yang layak huni, baik melalui pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, maupun melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Melalui pelaksanaan Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim serta peningkatan kualitas perumahan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dapat berjalan secara optimal sehingga pada akhirnya pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjiwa diri, mandiri dan produktif serta diperlukan koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat.

Guna menjamin efektivitas pelaksanaannya, proses implementasi Rencana Strategis ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme pemantauan capaian kinerja triwulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara realisasi di lapangan dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun manajerial yang muncul. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi basis data utama dalam pengambilan keputusan, perbaikan strategi operasional, serta sebagai wujud akuntabilitas publik atas kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur.

Sebagai dokumen yang menjabarkan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Timur, dokumen Renstra ini diharapkan menjadi acuan dan diselaraskan oleh seluruh pihak dan menjadi referensi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.

LAMPIRAN

I. MATRIKS KINERJA

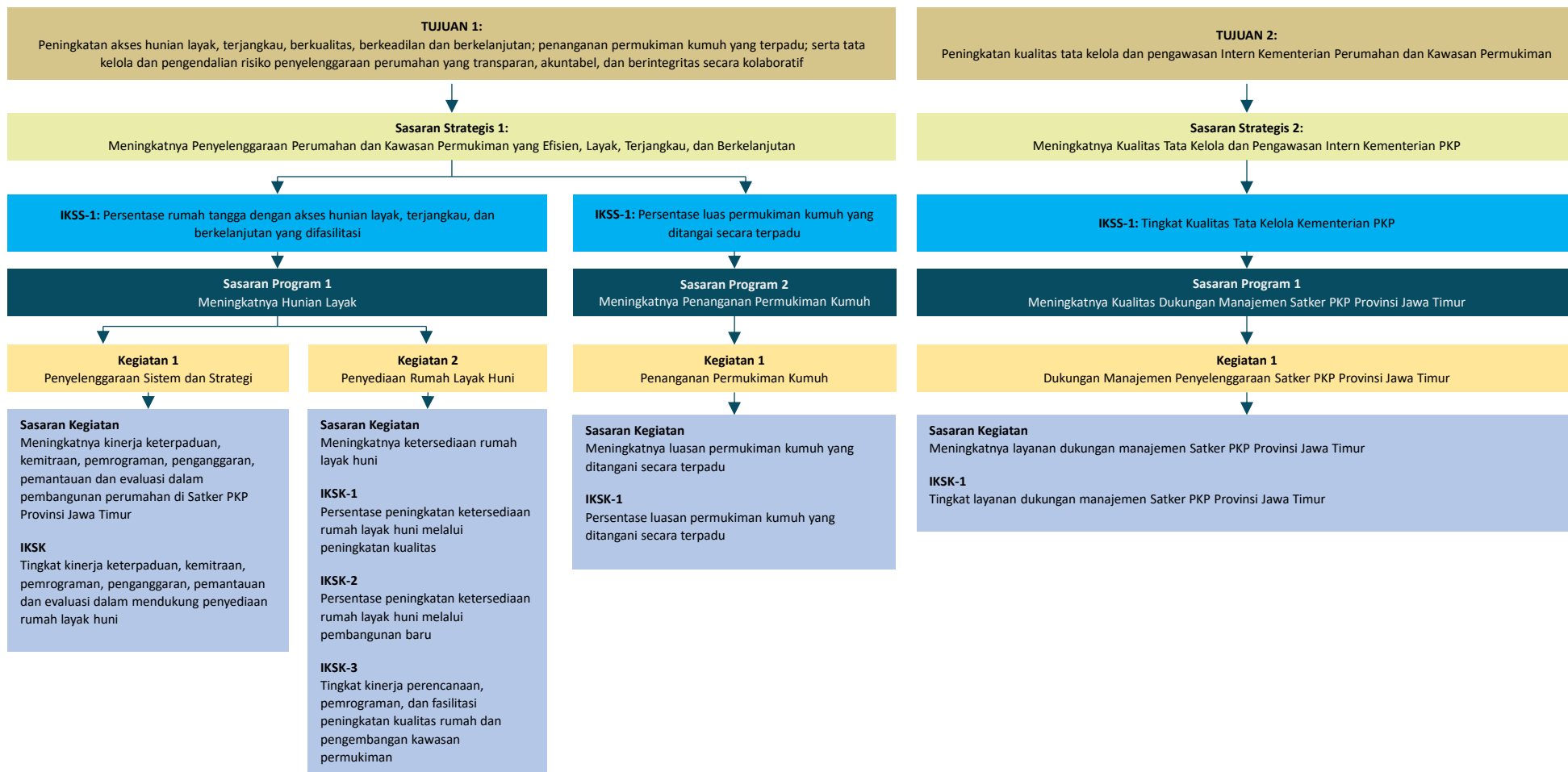
II. METODE PERHITUNGAN

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 - 2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1			-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan																	
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:																	
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi																
SASARAN PROGRAM:Meningkatnya Hunian Layak																	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi																	
SASARAN KEGIATAN:Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	1	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan		1	-	-	-	-	1	38.472	-	-	-	-	-	38.472
	2	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan		1	1	1	1	1	5	95.075	251.619	265.206	279.528	294.622		1.186.050
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	80.000	84.320	88.873	93.672		346.866
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum																	
SASARAN KEGIATAN:Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit		129	1.090	1.090	1.090	1.090	4.489	9.159.000	15.976.058	16.612.555	17.376.350	18.394.745		77.518.708
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit		-	556	556	556	556	2.222	0	5.555.556	5.888.889	6.222.222	6.555.556		24.222.222
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni																	
SASARAN KEGIATAN:Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit		3.167	21.407	21.407	21.407	21.407	88.795	107.678.000	518.209.953	544.058.905	569.907.858	595.756.810		2.335.611.525
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit		-	2.178	2.178	2.178	2.178	8.712	0	938.597.394	966.708.833	1.012.638.438	1.058.568.043		3.976.512.708
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit		88	484	528	528	528	2.156	176.000.000	911.142.012	1.002.302.400	1.047.763.200	1.093.224.000		4.230.431.612
	4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan		1	-	-	-	-	1	2.562,60	-	-	-	-		2.563
	5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		1	-	-	-	-	1	640.795	-	-	-	-		640.795

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1			-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																	
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																
SASARAN PROGRAM:Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh																	
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh																	
SASARAN KEGIATAN:Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		Hektar		-	15	20	-	-	35	-	31.575.000	44.200.000	-	-	75.775.000
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																	
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN PROGRAM:Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur																	
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur																	
SASARAN KEGIATAN:Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)		Layanan		1	1	1	1	1	5	2.862.610	7.836.708	8.228.543	8.639.970	9.071.969	36.639.800
	2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)		Layanan		1	1	1	1	1	5	4.678	15.300	16.065	16.868	17.712	70.622
	3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)		Layanan		-	1	1	1	1	4	-	71.000	74.834	78.875	83.134	307.843
	4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)		Layanan		-	1	1	1	1	4	-	112.500	118.575	124.978	131.727	487.780
	5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan		-	1	1	1	1	4	-	80.000	84.320	88.873	93.672	346.866
	6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)		Layanan		1	1	1	1	1	5	6.741	71.375	74.944	78.691	82.625	314.376
	7	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan		-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.582
TOTAL TARGET DAN ANGGARAN (2025 - 2029)												296.487.934	2.429.674.474	2.588.823.788	2.663.415.816	2.782.485.378	10.760.887.390

LAMPIRAN II
POHON STRATEGIS SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR



LAMPIRAN II
METODE PERHITUNGAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan								
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak								
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi								
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	IKSK 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 1 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 5 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	IKSK 1	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 129 unit 2027: 1.090 unit 2029: 1.090 unit 2026: 1.090 unit 2028: 1.090 unit Total : 4.489 unit	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	IKSK 2 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	OK 2 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 556 unit 2029: 556 unit 2026: 556 unit 2028: 556 unit Total : 2.222 unit	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni					
SK 1 Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1 Jumlah unit rumah swadaya (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3.167 unit 2027: 21.407 unit 2029: 21.407 unit 2026: 21.407 unit 2028: 21.407 unit Total : 88.795 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 2 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2 Jumlah rumah khusus yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 2.178 unit 2029: 2.178 unit 2026: 2.178 unit 2028: 2.178 unit Total : 8.712 unit	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah rumah susun yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 88 unit 2027: 528 unit 2029: 528 unit 2026: 484 unit 2028: 528 unit Total : 2.156 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 1 laporan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		OK 5 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 1 laporan	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh					
SK 1 Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: - Ha 2027: 20 Ha 2029: - Ha 2026: 15 Ha 2028: - Ha Total: 35 Ha	Non Kumulatif	Internal
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur					
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur					
SK 1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	IKSK 1 Tingkat layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	OK 1 Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 5 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 5 layanan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		OK 3 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 4 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah Layanan Sarana Internal <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 5 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal



SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR